

Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Ridwan Jaya Agung.

Ferdi Wijaya¹, Kriswanto Widiawan²

Abstract: This thesis aims to create a design of occupational safety and health management system in PT. Ridwan Jaya Agung that in accordance with the Government Regulation Number 50 of 2012. The design of the system consists of several stages which are initial audit, interviews related to the company's capabilities, analysis of the company's initial gap, policy determination, design of *K3* implementation, design of *K3* monitoring, introduction of *K3*, and new audits. In the initial audit, the company could only fulfilled 1 out of 122 criteria; equivalent to 1%, which according to the Government Regulation is not a good or ideal auditing results. Therefore, through this thesis, the researcher had created a design of occupational safety and health management system that meets 119 criteria; equivalent to 98%, and can be said to have fulfilled the implementation of occupational safety and health management system.

Keywords: management system *K3*; government regulation number 50 of 2012.

Pendahuluan

PT. Ridwan Jaya Agung adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor yang berdiri sejak tahun 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara. PT Ridwan Jaya Agung bergerak di bidang jasa angkutan hasil tambang dengan jumlah armada 25 unit *dump truck* yang terletak pada Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Proses jasa angkutan yang dilakukan oleh PT Ridwan Jaya Agung mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan adalah 24 jam per harinya. Berdasarkan data pelaporan pengawas di perusahaan pada tahun 2020 terjadi kecelakaan kerja berskala besar dan berskala kecil dengan jumlah kurang lebih 5 kecelakaan kerja yang tidak didokumentasikan. Contoh kecelakaan berskala kecil seperti melakukan pengelasan tanpa menggunakan kacamata las sehingga dapat menyebabkan perih di mata. Contoh kecelakaan berskala besar seperti pekerja bekerja di bawah *Dump Truck* yang keadaan terangkat, sehingga *Dump* yang terangkat turun sehingga membuat pekerja terjepit sehingga dapat menyebabkan kematian.

Pada awalnya berdiri PT. Ridwan Jaya Agung ini masih belum memiliki program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*K3*) dan dokumen-dokumen untuk mengidentifikasi kecelakaan kerja dan aktifitas kerja yang memiliki risiko kecelakaan kerja, sedangkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 “setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (*SMK3*) di perusahaanya.” Bentuk penyelesaian permasalahan yang dialami dari PT Ridwan Jaya Agung, yang diusulkan oleh penyusun ialah perancangan *SMK3* yang akan disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan dan hukum yang berlaku. Harapannya penerapan sistem ini *SMK3* ini dapat membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan kecelakaan kerja yang terjadi, juga dapat meminimalkan potensi kerugian yang tidak perlu. Dukungan penuh serta komitmen dari perusahaan dalam proses perancangan *SMK3* akan sangat dibutuhkan, agar setiap ketentuan, rencana maupun program-program *SMK3* yang dibuat, dapat diwujudkan dengan baik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan metode perancangan. tahapan prosedur penyusunan dan perancangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Ridwan Jaya Agung. Tahapan ini diharapkan nantinya dapat dicapai. Penjelasan pada tahapan metode perancangan sebagai berikut:

Studi Literatur

Tahapan ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (*K3*). Tujuan dari tahapan ini

^{1,2} Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Industri, Universitas Kristen Petra. Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236. Email: ferdywijaya02@gmail.com, kriswidi@petra.ac.id

adalah menambah pengetahuan penyusun, dan dapat dimengerti untuk menyelesaikan tugas yang didapatkan dari perusahaan. Literatur yang digunakan meliputi buku, jurnal, dokumen perusahaan dan fasilitas internet.

Wawancara dengan pemilik perusahaan

Pada tahap ini dimana penyusun melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kesiapan perusahaan untuk menerapkan sistem K3 serta mencari tahu batas kemampuan perusahaan dalam melakukan perancangan sistem manajemen K3. Tujuan dari tahapan ini adalah agar nantinya perancangan yang dibuat bisa benar-benar berdasarkan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan saat ini.

Observasi awal dilapangan mengenai permasalahan yang ada

Pada tahap ini penyusun akan mewawancarai pemilik perusahaan mengenai permasalahan yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi di perusahaan. Observasi juga dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung di perusahaan. Hal lain yang akan dilakukan penyusun juga yaitu mengumpulkan data awal sebagai bentuk hasil penyusunan awal yang berkaitan dengan permasalahan K3 pada PT. Ridwan Jaya Agung. Data yang dikumpulkan penyusun berupa perkiraan angka kecelakaan kerja.

Merancang materi penilaian kesesuaian dengan persyaratan K3

Tahap ini di lakukan bersamaam pada tahap observasi awal yang dimana tahap merancang materi penilaian kesesuaian sebelum dilakukan penyusunan awal di perusahaan PT. Ridwan Jaya Agung. Sebelum penyusun melakukan perancangan, penyusun harus menyiapkan *checklist* untuk keperluan penilaian tersebut yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012.

Melakukan penilaian kesesuaian awal dengan syarat K3

Pada tahap ini dilakukan penilaian kesesuaian awal dengan persyaratan K3. Penilaian yang dilakukan penyusun pada awal sebelum melakukan kesesuaian awal yaitu dengan cara mencari apa yang sudah ada di perusahaan serta dilakukan, mencari apa yang belum dilakukan perusahaan, dan mencari yang sudah diterapkan di perusahaan

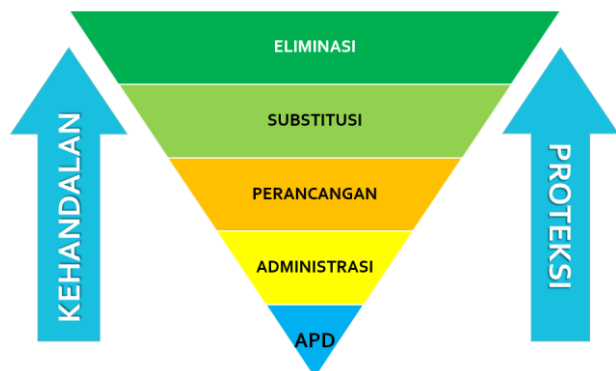
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012.

Melakukan penyusunan komitmen dan kebijakan K3

Setelah tahap penyusunan komitmen dan kebijakan K3 telah selesai, berikutnya yaitu melakukan perencanaan pelaksanaan K3. Tahap perencanaan K3 ini meliputi merancang tujuan dan sasaran dari K3, sistem pertanggung jawaban K3 di perusahaan, skala prioritas, sumber daya perusahaan, dan upaya pengendalian risiko (persiapan alat pelindung diri, rambu peringatan, instruksi kerja).

Melakukan perancangan pengendalian pelaksanaan K3

Pada tahap perancangan pengendalian K3 ini dilakukan untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, dan belum ada serta belum dilaksanakan oleh perusahaan. Tahap ini juga dilakukan pengendalian dan perbaikan untuk mengatasi dan menghindari potensi terjadinya kecelakaan kerja di zona yang dianggap memiliki potensi yang berbahaya bagi para pekerja di perusahaan. Dengan cara penjabaran untuk mengatasi sesudah terjadinya kecelakaan melalui tindakan kuratif, seperti sistem pelaporan kecelakaan, investigasi kecelakaan kerja, wewenang dan tanggung jawab atas kejadian. Cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan melalui beberapa tindakan preventif, melalui cara promotif (dengan melalui kampanye K3, publikasi larangan, rambu peringatan), ataupun dengan cara langsung (dengan menggunakan prosedur kontrol, instruksi kerja dan *form control*). Cara pengendalian yang dipilih akan disesuaikan dengan kasus yang teridentifikasi dan yang memiliki risiko yang besar terlebih dahulu. Strategi pengendalian juga akan mengikuti prioritas pengendalian yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi dan alat pelindung diri.



Gambar 1. Hierarki pengendalian risiko (Mahendra [1])

Adapun penjelasan dari setiap metode hierarki pengendalian risiko adalah sebagai berikut:

- Eliminasi merupakan metode paling efektif. Metode ini bertujuan untuk memodifikasi atau menghilangkan suatu pekerjaan, alat, mesin, dan proses yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pekerja.
- Substitusi merupakan metode untuk mengganti peralatan kerja yang berbahaya dengan peralatan kerja yang lebih aman.
- Rekayasa teknis merupakan metode untuk mengubah desain atau menambahkan alat baru di lingkungan kerja yang dapat membantu pekerja untuk mengatasi permasalahannya.
- Pengendalian administratif merupakan metode pemberian peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan kerja
- Penggunaan alat pelindung diri merupakan metode untuk mengurangi dampak kecelakaan kerja dengan memberikan alat pelindung diri bagi pekerja saat melakukan aktivitas kerja yang berbahaya.

Validasi

Pada tahap ini berkas pembuatan rancangan K3 telah jadi, validasi ini dilakukan untuk melihat secara keseluruhan apakah rancangan yang dibuat akan dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Apabila perancangan sudah dilakukan dengan baik maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya dan diteruskan ke perusahaan. Apabila perancangan tidak *valid* atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan serta pegawai, maka diperlukan perancangan kembali dengan melihat kesanggupan perusahaan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan. Validasi ini dapat dilihat atau dilakukan percobaan kepada pegawai yang mau atau sukarela membantu perusahaan untuk mencoba perancangan apakah dapat dilaksanakan dan dapat mengikuti rancangan K3 yang ada.

Pemenuhan $\geq 60\%$

Pada tahap ini, perusahaan akan memenuhi persentase perancangan sebesar 60% disebabkan perusahaan tergolong kategori industri menengah, sehingga perusahaan harus dapat mencapai 60% hingga 84% perancangan dari 122 butir kriteria yang ada untuk mendapatkan tingkat presentasi yang baik. Apabila perancangan sudah memenuhi 60%, maka perusahaan dapat menerapkan prosedur yang sudah dirancang, tetapi jika tidak mencapai 60% penilaian, perusahaan harus kembali merancang prosedur untuk dapat memenuhi 60% butir penilaian (Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2012 [2]).

Tabel 1 Kategori perusahaan dan tingkat penerapan SMK3 (Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2012 [2]).

Kategori perusahaan	Tingkat pencapaian penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Tingkat penilaian penerapan memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Tingkat penilaian penerapan memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Tingkat penilaian penerapan memuaskan

Pada tahap ini tingkat penerapan SMK3 terbagi menjadi 3 tahap yaitu tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjutan. Untuk penjelasan tingkat pemenuhan sebagai berikut:

- Tingkat awal merupakan tingkat yang dapat dipenuhi perusahaan dengan kategori industri kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja sekitar 5-19 pekerja.
- Tingkat transisi merupakan tingkat yang dapat dipenuhi perusahaan dengan kategori industri menengah yang memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 pekerja.
- Tingkat lanjutan merupakan tingkat yang dapat dipenuhi perusahaan dengan kategori industri besar yang memiliki tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 100 pekerja.

Hasil dan Pembahasan

Ringkasan hasil audit awal K3

Dalam pedoman penilaian penerapan SMK3 memiliki 12 elemen yang berisikan 166 butir *sub*-kriteria. PT. Ridwan Jaya Agung, tergolong ketegori perusahaan level menengah dengan jumlah pegawai kurang lebih 70 pekerja sehingga cukup memenuhi syarat SMK3 tingkat transisi. Kriteria yang akan digunakan adalah 122 sub-kriteria yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2012. Sub-kriteria yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam pedoman penilaian penerapan SMK3 disesuaikan dengan kemampuan telah terpenuhi (sesuai) jika perusahaan sudah memiliki ketentuannya dan dapat dilihat pad Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi awal kesesuaian dengan persyaratan SMK3

No	Kriteria	Jumlah kriteria	Penilaian		
			Sesuai (% dari 122)	Minor (% dari 122)	Mayor (% dari 122)
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	20	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	9	0 (0%)	0 (0%)	9 (100%)
3	Pengendalian perencanaan dan peninjauan kontrak	6	0(0%)	0 (0%)	6 (100%)
4	Pengendalian dokumen	3	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
5	Penilaian dan pengendalian produk	4	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	37	1 (3%)	1 (3%)	35 (94%)
7	Standar pemantauan	15	0 (0%)	0 (0%)	15 (100%)
8	Pelaporan dan perbaikan kekurangan	4	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	10	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)
10	Pengumpulan dan penggunaan data	4	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	10	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)
122 sub-kriteria			1 (1%)	1 (1%)	120 (72%)

Kriteria dikatakan mayor jika perusahaan masih belum membuat sama sekali ketentuannya. Kenyataan yang ada PT. Ridwan Jaya Agung masih baru pemenuhan kriteria penerapan SMK3 sebesar 1% (1 dari 122 sub-kriteria). Sementara untuk hasil penilaian tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tergolong baik adalah 60% dari 100% persentase sub-kriteria. Hasil rekapitulasi hasil penilaian audit penerapan SMK3 pada PT. Ridwan Jaya Agung dapat dilihat pada Tabel 2. Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Ridwan Jaya Agung dapat dilaksanakan melalui pemenuhan butir-butir yang ada. Pemenuhan sub-kriteria dapat dimulai dengan pembuatan kebijakan dan komitmen perusahaan yang berkaitan dengan K3. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan ketentuan-ketentuan K3, pembuatan prosedur kerja *standard operating procedure* dan *form* bersangkutan.

Kesanggupan perusahaan berkaitan SMK3

PT. Ridwan Jaya Agung, bersangkutan dengan perancangan SMK3 telah membuat batasan yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada, juga yang dapat disediakan. Dalam arti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dirancang akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan PT. Ridwan Jaya Agung dan juga berdasarkan kebutuhan pemenuhan kriteria Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 serta biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan:

- a. Panitia K3 perusahaan
SMK3 yang dirancang di sebuah perusahaan memerlukan orang yang ditunjuk untuk memperhatikan bagian K3. Terkait dengan panitia K3, PT. Ridwan Jaya Agung memilih 2 orang dari perusahaan untuk merangkap pekerjaan sebagai panitia pembina K3. Panitia K3 sendiri terdiri dari sekretaris K3 dan petugas K3. Sesuai dengan kesanggupan perusahaan, dimana dari antara 70 pekerja, 2 diantaranya akan dijadikan secara khusus untuk menangani K3.
- b. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja
Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan PT. Ridwan Jaya Agung, yaitu BPJS ketenagakerjaan, yang diambil yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK).
- c. Alat pelindung diri
Alat pelindung diri, merupakan salah satu kelengkapan dan pendukung K3 juga akan disediakan oleh perusahaan. PT. Ridwan Jaya Agung menyanggupi untuk berinvestasi untuk membeli kelengkapan K3 dan salah satu yang penting juga yaitu alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang diperlukan yaitu *helm safety*, sepatu *safety*, sarung tangan *safety*, masker, dan *ear plug*. Alat pelindung diri yang akan dibeli juga telah dipertimbangkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada. Investasi untuk alat pelindung diri memang tergolong biaya yang cukup besar jika dibandingkan dengan biaya yang biasa dikeluarkan perusahaan untuk biaya pengobatan dan lain-

lain. Alat pelindung diri bukan merupakan sebuah produk sekali pakai, tetapi alat pelindung diri ini dapat digunakan hingga rusak atau tidak layak.

d. *Standard operating procedure* dan instruksi kerja

Standard operating procedure akan berguna untuk setiap karyawan sebagai pedoman kerja saat mau menjalankan proses yang ada. *Standard operating* dan instruksi kerja nanti akan diketik pada suatu kertas yang akan dilaminating. Cara untuk merancang *Standard operating* akan berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan kepala mekanik serta disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tujuan dari *Standard operating* ini adalah agar setiap pekerja dapat mengetahui dan mengikuti atau menjalankan *Standard operating* kerja secara baik dan benar. Dengan adanya penggunaan kertas yang dilaminating akan membantu pekerja untuk mengetahui sistem yang ada perusahaan dan cara kerja. Dengan adanya kertas yang harus dilaminating pastinya akan membuat dampak yang baik bagi perusahaan. Kertas yang dilaminating dapat bertahan lama, sehingga perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya 1 kali. Tidak hanya akan dicetak di kertas, tetapi dokumen *Standard operating* dan instruksi kerja akan disimpan dalam bentuk *file* di perangkat perusahaan.

e. *Training*

Training ahli K3 juga akan diberikan pada panitia K3. Perusahaan PT. Ridwan Jaya Agung juga bersedia untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp.8.000.000,- hingga 9.500.000,-. Untuk melakukan *training* ahli K3 kepada panitia K3.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mendapatkan sertifikat ahli K3 serta dapat mengidentifikasi risiko, bahaya dan sebagainya.

Ketidaksesuaian kriteria perancangan SMK3

Hasil audit penilaian penerapan SMK3 yang telah dilakukan menunjukkan adanya kriteria yang belum terpenuhi dan tergolong dua kategori yaitu mayor (ketidaksesuaian mayor) dan minor (ketidaksesuaian minor). Ketidaksesuaian mayor adalah perancangan yang belum ada sama sekali dilakukan secara tertulis atau sama sekali belum terpenuhi oleh perusahaan, sedangkan ketidaksesuaian minor adalah perancangan yang sudah ada secara tertulis, tetapi tidak dijalankan di perusahaan. Terdapat juga kategori sesuai, dimana peraturan sudah ada dan dijalankan di sebuah perusahaan. Pemenuhan ini dilakukan dengan

tujuan perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Penjelasan tentang pemenuhan kriteria-kriteria yang tergolong ketidaksesuaian mayor dan minor ini, untuk pemenuhannya akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

Penjadwalan pemenuhan ketidaksesuaian penerapan SMK3

Pemenuhan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dilakukan agar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dalam pemenuhan tersebut pastinya tidak bisa dilakukan dan direalisasikan secara langsung atau secara *instant*. Untuk pemenuhannya juga harus memperhatikan kondisi perusahaan, karena kemampuan perusahaan belum tentu bisa memenuhi semua penilaian dalam jarak waktu yang sama, sehingga diperlukan jarak pemenuhan selama 3 tahun yaitu tahun ke-0 hingga tahun ke-2. Dimensi waktu dari tahun ke-0 hingga tahun ke-2 diperlukan perancangan. Hasil penilaian setelah perancangan akhir untuk perbandingan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil penilaian audit setelah perancangan

No	Kriteria	Jumlah Kriteria	Pemenuhan Kriteria
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	20	20 (100%)
2	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	9	9 (100%)
3	Pengendalian perencanaan dan peninjauan kontrak	6	6 (100%)
4	Pengendalian dokumen	3	3 (100%)
5	Penilaian dan pengendalian produk	4	4 (100%)
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	37	37 (100%)
7	Standar pemantauan	15	14 (93.33%)
8	Pelaporan dan perbaikan kekurangan	4	4 (100%)
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	10	10 (100%)
10	Pengumpulan dan penggunaan data	4	4 (100%)
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	10	8 (80%)

Perusahaan akan memenuhi ketentuan dalam waktu 3 tahun dengan tujuan penerapan SMK3

tidak terlalu lama dan juga tidak memerlukan biaya yang sangat besar di awal pemenuhan. Pada tahun ke-0 perusahaan sanggup untuk memenuhi secara langsung dengan rincian biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar atau tergolong kecil. Butir yang akan dipenuhi perusahaan pada tahun ke-0 yaitu biaya mencetak prosedur dan instruksi kerja, membeli sarana dan prasarana keselamatan dan pembuatan rambu rambu K3, dan juga memenuhi butir-butir kriteria yang bersifat *urgent*. Untuk pemenuhan tahun ke-1 perusahaan melanjutkan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang *less urgent* dengan biaya yang masih tidak terlalu besar. Pemenuhan selanjutnya adalah pemenuhan tahun ke-2, yang mana pada tahun ke-2 memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan tahun ke-1. Pemenuhan butir pada tahun ke-2 memiliki tingkat yang lebih sulit dan membutuhkan waktu yang panjang untuk penerapannya. Pemenuhan pada tahun ke-2 juga tentunya akan melibatkan lebih banyak pihak lagi. Pemenuhan ini juga harus memperhatikan dengan yang ekonomi kurang baik karena masa pandemi COVID-19 yang membuat pekerjaan muatan berkurang. Untuk strategi pemenuhan tiap butir tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4.

memperlihatkan pemenuhan yang bisa dilakukan pada Tahun 2021 (Tahun ke-0) sebesar 58 Butir dari 122 butir dengan tingkat penilaian sebesar 47.54%. Tahun berikutnya (Tahun ke-1) perusahaan telah merealisasikan sebesar 32 Butir dari 122 butir dengan tingkat persentase 26.23%. Tahun berikutnya (Tahun ke-2) perusahaan merealisasikan sebesar 29 butir atau setara dengan 23.77%, Sehingga pada tahun ke-2 perusahaan berhasil memenuhi total 119 butir atau 97.5% dari 122 butir. Total butir yang digunakan pada tingkat transisi sebesar 122 butir, 3 butir yang lainnya yaitu butir 7.4.4 yang berbunyi “perusahaan menyediakan pelayaran kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan”, 12.4.1 yang berbunyi “terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (*briefing*) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.”, 12.5.1 yang berbunyi “perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan”. 3 butir yang ada tidak tertulis didalam Tabel 4, disebabkan perusahaan tidak ingin memenuhi butir tersebut.

Tabel 4. Penjadwalan pemenuhan perbutir pertahun

No	Kriteria	Tahun ke		
		0	1	2
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9,	1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.3,	1.4.5
2	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1,	2.2.1	2.1.2, 2.3.4
3	Pengendalian perencanaan dan peninjauan kontrak	3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,	3.1.4	3.1.3, 3.2.2
4	Pengendalian dokumen	4.1.1, 4.2.1	4.1.2	-
5	Penilaian dan pengendalian produk	5.1.1, 5.2.1,	5.1.2	5.1.3
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.4, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 6.7.6, 6.7.7, 6.8.1	6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.7, 6.5.8, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5	6.1.1, 6.4.3,, 6.7.4, 6.8.2
7	Standar pemantauan	7.2.3, 7.4.3, 7.2.1	7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5	7.1.2, 7.1.4, 7.1.5,
8	Pelaporan dan perbaikan kekurangann	8.1.1, 8.2.1, 8.3.1	-	8.3.2
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	9.1.1, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.4, 9.3.5,	9.1.3, 9.3.3	9.1.2
10	Pengumpulan dan penggunaan data	10.1.1, 10.1.2	10.2.1, 10.2.2	-
11	Audit SMK3	-	-	-
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	-	12.2.1, 12.2.2	12.1.4, 12.1.5, 12.1.6
	Total 122 dari 166	62 (47,54%)	39 (26,23%)	18 (23,77%)
	Akumulasi	62 (47,54%)	101 (73,77%)	119 (97,54%)

Tabel 5. Perbandingan pemenuhan kriteria audit awal dan akhir

No	Kriteria	Jumlah Kriteria	Pemenuhan Kriteria	
			Audit Awal	Audit Akhir
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	20	0 (0%)	20 (100%)
2	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	9	0 (0%)	9 (100%)
3	Pengendalian perencanaan dan peninjauan kontrak	6	0 (0%)	6 (100%)
4	Pengendalian dokumen	3	0 (0%)	3 (100%)
5	Penilaian dan pengendalian produk	4	0 (0%)	4 (100%)
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	37	1 (3%)	37 (100%)
7	Standar pemantauan	15	0 (0%)	14 (93.33%)
8	Pelaporan dan perbaikan kekurangann	4	0 (0%)	4 (100%)
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	10	0 (0%)	10 (100%)
10	Pengumpulan dan penggunaan data	4	0 (0%)	4 (100%)
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	10	0 (0%)	8 (80%)
	122 dari 166		1 (1%)	119 (98%)

Perbandingan gap sebelum dan sesudah perancangan penilaian SMK3

Gap Penilaian sebelum dan sesudah perancangan akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan penilaian ini disebabkan karena adanya pemenuhan butir-butir penilaian, sehingga yang sebelumnya tergolong kategori mayor (belum ada sama sekali) atau minor (ada tetapi tidak dijalankan) akan berubah menjadi sesuai. Perbedaan akan terlihat ketika telah berjalan hingga tahun ke-2, karena untuk membangun dan menetapkan hasil perancangan membutuhkan waktu yang panjang dan keadaan dari segi keuangan dari perusahaan. Hasil penilaian audit awal menunjukkan bahwa perusahaan hanya memenuhi 1 butir penilaian dari 122 butir penilaian. Setelah dilakukannya perancangan pemenuhan penilaian, perusahaan akan memenuhi 119 butir dari 122 butir penilaian. Tiga butir yang tidak dipenuhi oleh perusahaan adalah 7.4.4, 12.4.1, dan 12.5.1. perbandingan secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 2 yaitu rekapitulasi awal kesesuaian dan Tabel 3. Perbandingan juga dapat dilihat pada Tabel 5 yang merupakan perbandingan kesesuaian awal dan akhir.

Simpulan

Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani,

maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Dan keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu sistem manajemen yang meliputi secara keseluruhan seperti struktur organisasi, perencanaan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk menjalankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PT. Ridwan Jaya Agung awalnya masih tidak memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sama sekali yang mengatur dan mendukung berjalannya K3, sehingga perusahaan memerlukan adanya perancangan SMK3. PT. Ridwan Jaya Agung sendiri tergolong dalam kategori industri menengah dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 70 orang. Oleh karena itu, perancangan tidak dilakukan secara sempurna, perusahaan akan memenuhi 122 dari 167 butir kriteria. Pada hasil audit awal, perusahaan hanya memenuhi 1 dari 167 butir kriteria atau setara dengan 1%. Untuk memenuhi penilaian penerapan SMK3 yang tergolong baik berada pada 60% dari 100% butir kriteria. Hasil akhir perancangan yang dilakukan mendapatkan hasil kesesuaian penilaian sebanyak 119 butir atau setara dengan 98% dari

100% (119 dari 123 sub kriteria). Dengan nilai persentase 98% perusahaan dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria penerapan SMK3.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 *tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.*

Daftar Pustaka

1. Mahendra, R. (2016). Hierarki Pengendalian Bahaya dalam OHSAS 18001:2007. Retrieved Juni 30, 2021 from: <https://isoindonesiacenter.com/hierarki-pengendalian-bahaya-dalam-ohsas-180012007/>